

ERDOGAN DAN TURKI SEBAGAI KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH

Poltak Partogi Nainggolan

Abstrak

Di tengah perkembangan Timur Tengah yang kian anarkis dan menimbulkan ketidakpastian, Erdogan membawa Turki sebagai negara penyelesai masalah dengan intervensi politik dan militernya yang aktif dewasa ini. Selain sebagai pengimbang agresifitas Iran, yang merepresentasikan kekuatan Syiah, Turki berusaha memperkuat dominasi kekuatan Islam Sunni, dengan hadir dalam berbagai konflik internal di Libya, Suriah, Irak, dan lain-lain. Kejayaan Islam di bawah Kekhalifahan Ustmaniyah atau Kesultanan Ottoman telah memperkuat kerinduan kawasan terhadap munculnya Turki sebagai kekuatan baru seiring dengan semakin surutnya peran Amerika Serikat. Analisis atas munculnya Erdogan dan Turki sebagai negara besar baru di Timur Tengah, dengan segala kontroversinya dibutuhkan, untuk dapat memahami dengan jelas situasi baru di kawasan dan arah perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pemahaman ini, Indonesia bisa mendorong pendekatan multilateral baru yang mendukung munculnya Turki sebagai kekuatan penyeimbang baru untuk melindungi kepentingan umat Islam dan menciptakan terobosan dan kemajuan signifikan dalam membangun stabilitas baru di Timur Tengah.

Pendahuluan

Turki menjadi kekuatan baru yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah, di luar Saudi Arabia dan Iran, dua negara kekuatan menengah (*middle power*) yang telah memperlihatkan lebih dulu posisi mereka sebagai negara luar yang turut terlibat dalam perkembangan di kawasan tersebut. Selama ini, lebih dari lima dasawarsa Perang

Dingin (*Cold War*), Timur Tengah dikontrol dua negara adidaya dunia, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, selain negara kekuatan menengah seperti Israel, Mesir, Irak, Iran dan Suriah. Seiring dengan perkembangan situasi baru di tingkat global dan kawasan, muncul kekuatan menengah baru, dalam hal ini Turki, di Timur Tengah.

Semakin surutnya peran dan kepemimpinan AS, terutama di



bawah Presiden Donald Trump, telah mendorong kekuatan baru tampil memimpin ke depan untuk turut mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Kemunculan Turki untuk mempengaruhi solusi konflik internal dan masa depan Timur Tengah tampak lebih agresif dibandingkan Saudi Arabia, sesama negara dengan pengikut Sunni yang besar, di samping juga dengan Iran, negara dengan pengikut Syiah mayoritas. Karena signifikan perannya dalam mempengaruhi perkembangan politik dan situasi keamanan kawasan dewasa ini, eksistensi dan sepak terjang Erdogan dan Turki perlu diungkap melalui kajian ini.

Realitas menunjukkan peran Erdogan yang menampilkan dan sekaligus merepresentasikan wajah Turki tidak dapat diremehkan, melainkan perlu dibahas dan dianalisis dengan kritis. Tulisan ini menganalisis peran Erdogan sebagai aktor politik dan pembuat kebijakan, yang menjadikan Turki sebagai kekuatan regional baru dengan politik intervensinya. Data dikumpulkan dari sumber yang beragam, baik buku maupun media daring.

Turki sebagai Kekuatan Kawasan

Munculnya Turki sebagai kekuatan regional baru menandai berakhirnya peran dan julukan Turki sebagai 'orang sakit Eropa' pasca-kejayaan Kesultanan Ottoman, yang sulit diterima kehadirannya dalam Uni Eropa. Posisi geografis Turki di persilangan Eropa dan Asia membuat eksistensinya sebagai bagian dari anggota, apalagi kekuatan yang berpengaruh di kawasan menjadi gamang. Untuk itulah, ia harus menjadi negara yang

kuat, agar disegani kehadirannya di salah satu bagian kawasan manapun ia ingin tampil. Secara logis, sebagai konsekuensinya, Turki harus memiliki pemimpin yang ekstra kuat, didukung secara luas, dan dapat berkuasa dalam tempo yang lebih lama daripada para pemimpin sebelumnya.

Turki juga mempunyai beban sejarah, yakni harus muncul sebagai negara besar baru dan disegani di kawasan, walaupun tidak sebanding dengan Kekhalifahan Ustmaniyah (Kesultanan Ottoman), yang begitu hebat dengan politik imperialismenya yang menjangkau wilayah Eropa Timur. Sementara, peran negara AS yang melemah dan surut dari Eropa dan Timur Tengah, kian mendorong munculnya Turki sebagai kekuatan baru alternatif, yang bisa diharapkan dan didukung penuh oleh negara-negara Arab dan Maghribi, yang merupakan bekas jajahan Inggris, Perancis, dan AS, dengan mayoritas pengikut Sunni. Selama 600 tahun sejak abad ke-13, Dinasti Ustmaniyah telah menopang berdirinya Kekhalifahan Islam, yang wilayah kekuasaan dan hegemoninya begitu luas di daratan Eropa dan Asia, sebelum dibubarkan pada 3 Maret 1924 oleh tokoh muda dari militer, Mustafa Kemal Attaturk, yang mengintroduksi pemerintahan modern di bawah bentuk Republik (Sakinah, 2020).

Pasca-berakhirnya Imperium Ottoman, Turki tetap ingin menunjukkan peran besarnya dalam menentukan masa depan dunia dan kawasan, di bawah Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin politik modern Turki ini naik ke panggung kekuasaan sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 sebagai Perdana Menteri, dan tahun 2014 sebagai Presiden,

dengan mengubah konstitusi lewat referendum, agar bisa terus memimpin. Dengan caranya yang kontroversial untuk tetap berkuasa di Turki, semula ia tidak menarik perhatian dunia. Namun, dengan sikapnya yang agresif, mencampuri berbagai konflik internal atau domestik di beberapa negara di Timur Tengah, Erdogan menjadi faktor yang harus dicermati, yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan prospek kawasan itu. Ia memimpin Turki yang anggota NATO, persekutuan militer negara Eropa dan AS, yang secara simultan sebagai representasi kekuatan baru Muslim Sunni di Timur Tengah, selain Arab Saudi.

Keterlibatan Turki dalam Konflik Internal

Panggilan kepentingan untuk dapat menjadi kekuatan penyeimbang, yang turut menentukan masa depan kawasan, sebagai representasi mayoritas Sunni di Timur Tengah, memotivasi Erdogan untuk tampil asertif sebagai Presiden Turki belakangan. Walaupun tidak dapat diabaikan, Turki juga berkepentingan atas kontrol sumber daya minyak dan gas, melalui darat dan perairan sekitar kawasan. Intervensi Erdogan dalam mempengaruhi konflik internal di beberapa negara yang tengah dilanda konflik berskala rendah dan berkepanjangan di Timur Tengah, terlihat sekali di Suriah dan Libya. Ia mengirim tank-tank militernya untuk melindungi kelompok-kelompok perlawanan sipil Sunni, baik yang pro-demokrasi maupun kelompok ekstrim di Idlib, dari gempuran dahsyat militer Bashar al-Assad dan Rusia, terutama dengan jet-jet tempurnya. Secara simultan, ia juga

menyerang posisi etnik separatis Muslim Sunni Kurdi di sepanjang perbatasan Suriah dan Irak.

Dalam konflik domestik Libya pasca-Khadafi, mengabaikan sorotan internasional, Turki mendatangkan pasukan bayaran (*mercenaries*) dari Suriah dan Rusia untuk mendukung pemerintahan Al-Serraj melawan pasukan pemberontak (*Libyan National Army/LNA*) pimpinan Jenderal Haftar. Langkahnya mengundang Mesir, yang merasa terancam di perbatasan, untuk mengirim tentaranya mendukung Haftar, telah mengundang kemarahan Macron, Presiden Perancis, negara eks penjajah Libya, sehingga mereka saling tuding sebagai pengacau dan pembawa bencana di sana.

Sikap Erdogan tampak kontroversial. Turki sekubu dengan Rusia di Libya, tetapi dalam posisi berlawanan di Suriah. Ia menentang serangan udara Israel di Suriah, walaupun dilakukan terhadap instalasi militer. Di Lebanon, ia menentang serangan Israel atas Hezbollah di perbatasan Selatan. Di Palestina, ia mengecam politik aneksasi Israel dan mengancam negara itu jika merealisasikan niatnya, namun aneksasi perlahan Israel atas Tepi Barat (*West Bank*) dan Jalur Gaza (*Gaza Strip*) sesungguhnya sudah berjalan beberapa tahun ini. Erdogan mengecam keputusan Uni Emirat Arab yang akan segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam kesepakatan tiba-tiba yang diperantarai AS. Sejak Israel mengungkapkan rencana aneksasi wilayah Palestina, Erdogan mengancam akan menyerang negeri zionis itu, walau belum tampak manuver untuk mewujudkan ancamannya.

Plus-Minus Erdogan

Di bidang-ekonomi, di bawah Erdogan, Turki menghadapi krisis berat, yang diperparah penyebaran pandemi Covid-19. Sejak 2019, Turki diperkirakan sudah mengalami resesi, apalagi dewasa ini dengan kontraksi ekonomi 4 persen, inflasi melonjak hingga 12%, dan nilai Lira atas US\$ melemah menjadi 7,30. Bank sentral Turki telah menghabiskan US\$65 miliar untuk menopang Lira agar tidak anjlok terus. Upayanya meluncurkan stimulus menghadapi pandemi dalam 3 bulan terakhir, membuat utang konsumen meningkat 25%, menjadi lebih dari US\$100 miliar. Tingkat pengangguran mencapai 12,8%, dan bisa jauh lebih tinggi. Pelemahan Lira membuat standar hidup warga merosot tajam (CNBC, 13 Agustus 2020).

Selama memimpin Turki sejak tahun 2003 hingga sekarang, dalam posisi sebagai perdana menteri ataupun presiden, bukan tidak ada kebijakan konstruktif yang dilakukan Erdogan. Rakyat mencatat kebijakannya yang positif dalam memperkuat pendidikan agama dan moral, sejak Attaturk mengadopsi republik yang sekuler, bukan monarki atau teokrasi, ataupun keduanya. Dengan serangkaian kebijakan lainnya, seperti melarang minuman beralkohol, ia bersama Partai Keadilan dan Pembangunan yang ia pimpin sejak tahun 2017, membawa Turki kian konservatif di mata dunia.

Erdogan mengklaim telah mengikuti jalan demokrasi dalam merealisasikan segala ide dan gagasannya. Ia percaya pada kekuatan politik sipil Islam *vis a vis* militer dalam politik, namun dituding represif oleh lawan-lawan politik, terutama kaum muda

liberal serta para pengkritik dan penentangannya. Dengan partai politik di mancanegara yang sealiran, ia membangun solidaritas yang kuat, seperti Partai Keadilan di Mesir, dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia.

Bersama para pendukung dan simpatisannya ia membangun pan-Islamisme baru, di tengah friksi dan melemahnya kekuatan Islam global. Ia digadang-gadang sebagai model pemimpin khilafah global bagi mereka yang merindukan kehadiran 'Kekhalifahan neo-Ottoman.' Karena kedekatannya dengan Al-Qaeda dan Jabrat Al-Nusra, yang diidentifikasi Barat sebagai kelompok teroris, ia disebut pendukung gerakan pro-khilafah global. Keputusannya yang kontroversial mengubah museum Hagia Sophia menjadi masjid, demi memperkuat posisi partainya menjelang pemilu legislatif, memperberat tuduhan Barat atas posisinya sebagai pendukung, walaupun ia sendiri pernah mengatakan menolak, khilafah. Erdogan dicurigai Barat sebagai pendukung kelompok militan atau ekstrim Islam, terutama dalam konflik internal Suriah dan Libya.

Sayangnya, Erdogan tidak konsisten dalam memperlihatkan solidaritasnya pada kelompok Muslim. Ia mengusir etnik Muslim Uighur yang meminta perlindungan di negerinya sebagai pengungsi. Erdogan tidak pernah menentang China, termasuk sekubu dengan China dalam mendukung Pemerintahan Al-Serraj dan *Government of National Accord* (GNA)-nya di Libya. Terhadap pengungsi Suriah korban pemboman Rusia dan rezim Al-Assad di Idlib, Erdogan mendorong eksodus mereka dari Turki ke Eropa.

Penutup

Munculnya Erdogan yang kian aktif dalam mengintervensi konflik-konflik domestik di Timur Tengah merupakan upaya Turki dari upaya mengurangi ketergantungan kawasan atas eksistensi adidaya dunia dalam menciptakan dan membantu mengembalikan stabilitas kawasan. Sikap percaya diri Erdogan dan Turki muncul karena adanya dukungan kuat dunia Islam dewasa ini, yang rindu akan hadirnya Islam sebagai kekuatan global alternatif, dalam wujud Pan-Islamisme yang dipersatukan ideologi dan aspirasi perjuangan khilafah, yang kelak diharapkan membantu menyelesaikan konflik-konflik internal di negara-negara Islam, terutama di Timur Tengah. Namun, intervensi Turki sebagai kekuatan regional yang baru muncul, secara hipotetikal, belum tentu bisa memperbaiki kondisi, melainkan sebaliknya, justru kian menciptakan situasi anarki di negara-negara yang dilanda konflik, dan bahkan kawasan secara lebih luas. Sebab, situasi konflik yang tambah kompleks dengan aktor yang beragam, termasuk dari negara asing, dapat mempersulit upaya resolusi konflik.

Perkembangan situasi ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk merespons langkah Erdogan memperkuat barisan, sebagai negara pengdopsi demokrasi dengan penduduk mayoritas Muslim, dan mengajak Turki, sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan parlemennya, PUIC, untuk bersama-sama mendorong pendekatan multilateralisme dalam menyelesaikan berbagai konflik dan anarkisme di kawasan, serta

membantu dalam membebaskan kelompok Muslim minoritas dari kebijakan represif dan diskriminatif, seperti di China, Myanmar, dan juga India. Janji yang disampaikan Presiden Erdogan pada Presiden Jokowi pada pertemuan G-20 di Malaysia pada Desember 2019, untuk datang ke Indonesia di tahun 2020 ini, harus ditagih dan direalisasikan untuk menindaklanjuti jalan multilateralisme dalam politik luar negeri Indonesia yang tengah dikampanyekan dewasa ini.

Referensi

- Asmara, Chandra Gian. 2020. "Ucapkan Selamat ke Jokowi, Erdogan akan ke Indonesia 2020," *CNBC Indonesia*, www.cnbcindonesia.com, 29 Juni 2019, diakses 18 Agustus 2020.
- Hasugian, Maria Rita. 2020. "Panglima Militer Libya Ultimatum Erdogan Tarik Pasukannya atau Hadapi Senjata," *Tempo.co*, dunia.tempo.co, 3 Agustus 2020, diakses 18 Agustus 2020.
- Muhaimin, 2020. "Turki Deportasi Warga Uighur, Erdogan Dikecam Aktivis Muslim." *Sind8News.com*, international.sindo.news.com, 30 Juli 2020, diakses 18 Agustus 2020.
- Nainggolan, Poltak Partogi (ed). 2020. *Proxy War di Timur Tengah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Obor Indonesia.
- Nurfajriani, Rahmi. "7 Fakta Kepemimpinan Erdogan di Turki dari Cabut Larangan Jilbab hingga Ubah Sistem Pendidikan," *Pikiran Rakyat.Com*, 25 Juli 2020, diakses 8 Agustus 2020.
- Oktaviani, Zahrotul. 2020. "Main Mata Erdogan dengan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS),

- "*Republika.co.id*, 4 Agustus 2020, diakses 4 Agustus 2020.
- Pratama, Arie. 2020. "Jokowi, Mahathir & Erdogan Bakal Sepanggung di KL, Bahas Apa?" *CNBC Indonesia*, *www.cnbcindonesia.com*, 2 Desember 2019, diakses 18 Agustus 2020.
- Sakinah, Kiki. 2020. "Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924," *Republika Online*, 4 Maret 2020, diakses 8 Agustus 2020.
- Sebayang, Rehia. 2020. "Ekonomi Negeri Erdogan Tumbang, Turki di Ambang Resesi." *CNBC Indonesia*, 13 Agustus 2020.
- "Tetap Pertahankan Sekularisme Attaturk." *Kompas*, 4 Agustus 2020, hal. 4.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India* (2018) dan *Proxy War* di Timur Tengah (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.